



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 19 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

I. DATA PRIBADI

- 1. Nama : **ARIYANTA**
- 2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMERIKSAAN, PENILAIAN, DAN PENAGIHAN**
- 3. NHK : **158886**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 3.366.700.000**

- 1. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 725.000.000
- 2. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/60 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , WARISAN Rp. 800.000.000
- 3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/400 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
- 4. Tanah dan Bangunan Seluas 241 m2/200 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000
- 5. Tanah Seluas 2170 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 201.700.000
- 6. Tanah Seluas 681 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH TANPA
AKTA Rp. 140.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 16.000.000**

- 1. MOTOR, YAMAHA MIO SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 500.000
- 2. MOTOR, HONDA VARIO A1F02N36M1 AT Tahun 2019, HASIL
SENDIRI Rp. 12.500.000
- 3. MOTOR, HONDA TIGER TIGER Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 3.800.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	10.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.396.500.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.396.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.